PERS KITA

MADJALLAH

SPS & PWI

Digitalisasi oleh Perggiat Buku

No. 4
OKTOBER 1950

ISI :

Komentar kita ..... hal : 3
Tentang 6 unit pertjetakan „ 7
Pendidikan Djurnalis ..... „ 9
Akademi Nasional ..... „ 12
Pers dalam Parlemen ..... „ 13
Politik & Biaja Kempen ... „ 15
Pers Tamu dalam Soal Ambon ..... „ 18
Quo Vadis ? ..... „ 21
Perbedaan verslag Aneta-Antara ..... „ 24
Wartawan dan Kepentingan Negara ..... „ 28
De Nationale Pers ..... „ 29
Code of Ethics ..... „ 30
Laporan Antara ..... „ 31

PERS dalam PARLEMEN

Pidato Anggota Manai Sophiaan.

Dalam Pemandangan Umum babak ke - II.

INGIN sekali saja meminta perhatian Parlement dan Pemerintah buat satu soal jang lebih dulu (dalam babak pertama, lihat Pers Kita No. 3. Red.) telah dikemukakan oleh beberapa pembitjara, tetapi jang rupanja belum tjukup di-insafi atau di perhatikan dengan njata oleh Pemerintah, seperti terbukti dari Djawaban Pemerintah. Jaitu mengenai soal Pers dan ersbureau Nasional jang lebih² dalam masa **„perang dingin"** dan **„perebutan pengaruh atas public dan world opinion"** sekarang ini mendjadi sjarat jang penting dalam perdjoangan politik dan pembangunan kita. Baik kedalam maupun keluar, persuratkabaran dan kantor berita kita pantas dan harus mendapat perhatian dan bimbingan jg. lebih banjak dan lebih njata daripada dimasa lampau.

Terutama sekali bimbingan jang merupakan pula bantuan² njata didalam kesulitan²nja. Segala matjam keterangan atau kesanggupan Pemerintah jang bagus tidak ada harganja kalau tidak dapat merobah kenjataan sehari²nja.

Keterangan Pemerintah tentang kertas-koran misalnja mendapat sambutan tertawa-ketjut dan agak mengedjek dari sudara² pihak pers jang lebih tahu dan merasai sendiri akan bukti²-kenjataannja. Di Menado misalnja suratkabar seorang anggauta parlemen (sdr. Dauhan) jg. sudah sementara bulan terpaksa tidak terbit karena tidak ada kertas lagi, sampai sekarang masih tetap belum dapat kertas. Begitu djuga di Kalimantan..... meskipun ada keterangan Pemerintah jang begitu menjenangkan tentang kertaskoran. (Jaitu kertas sudah dikirim dan a.l. sudah diterima di Menado. Red).

Pemesanan masin²-pertjetakan buat pers kita adalah **satu** tindakan ke djurusan jang baik, akan tetapi tindakan pertama itu baik lekas disusul oleh tindakan kedua dan selandjutnja djangan tjuma bersifat setengah² sadja.

Dalam waktu dan suasna „perang dingin" sekarang ini lebih tegas warna dan sifatnja berbagai badan- atau tjara pemberitaan. Memang selama semua keadaan normaal dan baik² sadja tidak begitu terasa beda dan perlunja pers dan persbureau nasional. Apa lagi karena pers dan persbureau asing dalam hal alat dan kelengkapan pemberitaan melebihi pers kita.

Akan tetapi sebegitu lekas timbul sesuatu **pertentangan politik atau ekonomi**, sebegitu lekas **kelihatan dan terasa sekali perbedaan haluan dan warna atau tjara pemberitaan.**

Misalnja sadja perhatikan bagaimana tjara menjiarkannja telegram dr. Drees tentang Ambon dan perhatikan pula siapa jang menjiarkan banjak² berita dari Nikijuluw dengan Republik Maluku Selatannja?

Dalam keadaan dan pertentangan² seperti sekarang ini, baik lekas diwudjudkan kesediaan Pemerintah buat membantu pekerdjaan Persbureau Nasional seperti „Antara".

Kalau sekiranja „Antara" masih terasa kurang baik organisasinja, tentunja bisa diperbaikinja, akan tetapi Pemerintah djangan **ragu²** atau takut² memberi kesempatan jang baik kepada „Antara" buat bekerdja dengan alat² dan keuangan lengkap serta mentjukupi. **Subsidie atau sokongan semata² tidak perlu**. tetapi berikanlah misalnnja **„p e m b a j a r a n"** jang pantas buat langganan dines berita-„Antara". Dan djawatan² atau pegawai² negeri berserta tentara dan polisi biarlah diberikan batjaan suratkabar lebih banjak daripada sekarang.

Dalam hal batjaan tidak buruknja kita beladjar dan mentjonto dari Belanda jang bagian Welfare-nja bisa berlaku lebih luas.

Saja ingat dulu kantor berita „Antara" bisa menggunakan „zendernja" sendiri. Apa sebab sekarang tidak mungkin ?

Saja ulangi, kita tidak usah takut² memberi dan membukakan kesempatan jang baik buat Pers dan Persbureau kita. Semua negeri berlaku begitu. Dan dengan tindakan² jang diandjurkan dalam parlemen ini oleh antara lain sdr. Siauw Giok Tjhan dan sdr. Diapari sama sekali tidak dikurangi atau dirugikan kemerdekaan informasi dan kemerdekaan pemberitaan.

Puluhan dan malahan ratusan tahun pers-asing telah mendapat „voorsprong" atau keuntungan dan kemadjuan lebih dulu. Masin²-pertjetakannja dulu masih harga murah sekali dan turut difinancieer atau dibajari lebih dulu setjara crediet oleh importeurs, sehingga masin²nja sekarang kebanjakan sudah lama afgeschreven. Advertensi banjak dan besar². Herankah kita kalau dalam persaingan pers kita sering kalah ?

Dipandang setjara politis, setjara cultureel atau dari sudut apapun djuga, dari satu Pemerintahan Nasional boleh dipertanggung djawabkan usaha² njata buat memadjukan Pers dan Persbureau Nasional.

Itu sadja masih belum lengkap, sdr. Ketua!

Selain buat kepentingan pers dan persbureau nasional saja ingin andjurkan pula supaja Pemerintah bisa lekas menurunkan harga buku dan alat² keeprluan untuk batjaan serta kemadjuan rakjat.

Rakjat kita, terutama pemuda² kita sedang haus sekali akan pengetahuan dan kemadjuan. Djanganlah kehausan buat batja dan mentjari ilmu serta kemadjuan itu ditahan dan dipadjaki karena mahalnja harga buku.

Kemudian saudara Ketua, grafisch-industrie atau industri pertjetakan, di negara manapun djuga, di Eropah, di Amerika atau di Asia senantiasa mendahului, mendorong dan menjertai kemadjuan ketjerdasan rakjat. Dalam hal ini Pemerintah pun tidak kelihatan mempunjai satu haluan jg. tegas.

Digitalisasi oleh Penggiat Buku

PIDATO ANGGAUTA SIAUW GIOK TJHAN

Terhadap djawaban Pemerintah mengenai pertanjaan saja tentang persbureau nasional, saja musti njatakan rasa ketjewa saja. Pada saja ditimbulkan kesan, seolah² Pemerintah mendjalankan systeem main menggeser (afschuif-systeem).

Karena Pemerintah menjebut adanja Panitia Pers, maka saja hendak tanja: Apakah hasil Panitia Pers itu? Dapatkah pemerintah menjampaikan kepada D.P.R. usul² jang dikemukakan oleh PANITIA Pers itu, supaja kita dapat mengetahui usul² apa jang telah dilaksanakan dan usul² mana jang belum dilaksanakan? Saja akan lebih gembira pula apabila Pemerintah dapat mendjelaskan djuga, sebabnja usul² Panitia Pers belum semua di laksanakan atau ada sebagian jang tidak dapat dilaksanakan. Apakah panitia pers itu sekarang masih tetap bekerdja?

Apabila Panitia Pers itu belum djuga memberi adviesnja tentang persbureau nasional, apakah ini berarti Pemerintah menunggu sampai kiamatnja djaman untuk menentukan kedudukan „Antara" sebagai persbureau nasional?

Berhubung dengan soal pers nasional ini, saja hendak tambahkan beberapa pertanjaan pula.

Didjaman kolonial jang lampau, surat² kabar karena adanja undang² persbreidel tidak dapat mengupas setjara leluasa politik dan ekonomi kolonial Indonesia.

Pada djaman itu wartawan² apabila perlu melakukan perdjalanan dengan K.P.M. dan K.N.I.L.M. selalu mendapat potongan 50% atas ongkos perdjalanan dengan mengundjukan kartu wartawannja.

Sekarang sesudah Indonesia merdeka, bukan sadja orang wartawan tidak bisa mendapat potongan atas ongkos perdjalanan dengan K.P.M. atau G.I.A., akan tetapi tidak bisa mendapat prioriteit untuk memudahkan perdjalanannja.

Apakah perobahan ini di sebabkan karena K.P.M. dan G.I.A. masih dikuasai oleh model bangsa si pendjadjah dan Pemerintah Indonesia tidak dapat menentukan politik ongkos penumpang? Dapatkah Pemerintah menentukan potongan ongkos perdjalanan 50% bagi wartawan dengan mengundjuk kartu wartawannja, bukan sadja buat perdjalanan dengan kereta api seperti pengumuman baru³ ini, tetapi djuga untuk perdjalanan dengan K.P.M. dan G.I.A.?

Fasiliteit ini akan mempermudah berkembangnja pers nasional di Indonesia.

DJAWABAN PEMERINTAH Tg. 25-10-1950

Panitya Pers, jang sekarang masih ada, telah menjusun suatu laporan jang akan dikirim djuga kepada D.P.R., supaja pekerdjaan dari Panitya tersebut dapat diketahui pula.

Soal Persbiro dan Pers nasional dan hubungan²nja akan diselesaikan selekas mungkin.

Untuk memperkembangkan pers, selain dari apa jg. sudah diterangkan dalam djawaban Pemerintah babakan pertama, sedjak beberapa bulan diberikan kesempatan untuk 3 wartawan dalam tiap-tiap bulan menindjau ke daerah² di kepulauan kita, jang dikehendaki oleh mereka sendiri dengan penetapan dari Persatuan Wartawan Indonesia.

Untuk menjambung apa jang telah dikatakan dalam djawaban Pemerintah babakan pertama, maka dari 21 September sampai 10 Oktober 1950, telah dikirim untuk Makassar, Menado dan Samarinda 40 ton kertas. Apa sebabnja surat kabar dari Saudara Dauhan („Menara" di Menado) tidak mendapat kertas, sedangkan kertas menurut daftar penerimaan telah diterima oleh Kepala Daerah Minahasa pada tanggal 20 September 1950, Pemerintah akan sediiki.

Tentang potongan ongkos untuk wartawan. Pemerintah akan berhubungan dengan K.P.M. dan G.I.A. dan hasilnja akan diberitahukan nanti.

Menurut pengalaman, para wartawan selalu mendapat prioriteit, dan djika ada kesukaran terhadap hal ini, Kementerian Penerangan senantiasa bersedia untuk menjelesaikannja.

Soal kertas.

Semarang, 18 Okt. 1950.
Kepada Jth.
Sekretaris S.P.S.
Djl. Senen Raya No. 125
Djakarta.

Dengan segala hormat,

Sebagaimana Tuan maklum dari lampiran harian kita jang kita kirimkan kepada Tuan beserta surat ini, „Suara Merdeka" terpaksa, mulai hari ini harus terbit dengan 2 halaman empat (4) kali tiap minggu, dan hanja 2 (dua) kali dengan halaman normaal tiap hari Sabtu dan Senen.

Langkah demikian tadi terpaksa kita ambil, berhubung dengan situasi kertas jang sangat kurang sekali di Semarang. Kita hanja bisa mengharap adanja persediaan kertas tjukup untuk satu bulan sadja, dan dengan persediaan tadi kita harus mentjukupi kebutuhan kita hingga sampai achir bulan Desember 1950.

Kemudian, hal jang demikian tadi, kita persilahkan kepada perhatian Tuan, dengan penuh pengharapan agar Tuan selekasnja mengambil tindakan semestinja supaja situasi kertas di Semarang bisa segera normaal lagi; hingga kita bisa mengabdikan diri pada para pembatja kita dengan halaman² normaal sebagaimana sediakala.

Achirulkalam, kita sampaikan terima-kasih atas bantuan Tuan sebelum dan sesudahnja. Wassalam,

(Hetami)
P.O. „Suara Merdeka"
Semarang.

„Setia" akan terbit di Semarang
„Massa" kesukaran kertas

Dikota ini akan segera di terbitkan harian Tionghoa berbahasa Indonesia „Setia" jang diusahakan oleh Go Tjien Hok dari „Java Post" di Surabaja.

Diantara 5 buah ssk jang terbit di Semarang adaalah harian „Sin Min" satu²nja koran Tionghoa berbahasa Indonesia.

Mingguan „Suara Buruh" jang diusahakan oleh Sjamsu Harya Udaja dan ditjetak di Semarang pada tg. 19/9 jl. sudah djadi terbit.

Harian „Massa" ditjetak di Surabaja, kabarnja kini menghadapi kesukaran kertas.